



# RENCANA KERJA

# 2020

BALAI BESAR TAMAN NASIONAL  
GUNUNG GEDE PANGRANGO



## RENCANA KERJA 2020



Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango  
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tahun Anggaran 2019



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**  
Nomor: SK.561/BBTNGGP/BTU/PKS/12/2019

**TENTANG  
RENCANA KERJA  
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO  
TAHUN 2020**

**KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE  
PANGRANGO,**

Menimbang : a. bahwa sebagai melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;

b. bahwa Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tentang Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity;

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

- Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
  8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
  19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019;
  20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
  21. Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
  22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025;
  23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
  24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
  25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;

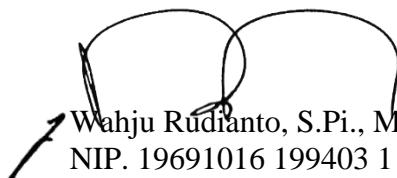
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39/MenLHK-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015- 2019;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.07/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2017 tanggal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.82/Menlhk/Setjen/SET.1/11/2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020;
31. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/REN.0/12/2019 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TENTANG RENCANA KERJA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TAHUN 2020.**

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2020 untuk periode satu tahun, dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sebagaimana Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta sebagai acuan dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Ditetapkan di : Cibodas  
Pada Tanggal : 30 Desember 2019  
Kepala Balai Besar,



Wahju Rudianto, S.Pi., M.Si  
NIP. 19691016 199403 1 001

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal KSDAE;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE;
3. Direktur Kawasan Konservasi;
4. Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
5. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati;
6. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi;
7. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Essensial.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR**  
**TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**  
Nomor: SK.561/BBTNGGP/BTU/PKS/12/2019

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL**  
**GUNUNG GEDE PANGRANGO**  
**TAHUN 2020**

---

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar dalam penyusunan alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2020. Renja ini disusun sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan.

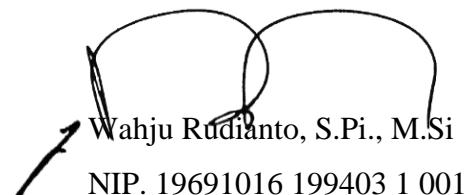
Rencana Kerja (Renja) Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2020 bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang perlindungan hutan dan konservasi alam. Dokumen ini diharapkan dapat digunakan sebagai instrumen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang meliputi program pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati beserta kegiatan dan indikator kinerja secara berjenjang.

Kami ucapan terima kasih dan penghargaan kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja ini, atas kesediaan meluangkan

waktu, tenaga dan pemikirannya. Semoga Rencana Kerja ini benar-benar dipedomani dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran strategis Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dapat tercapai dalam rangka mewujudkan visi dalam hal ini Sebagai Pusat Konservasi Hutan Hujan Tropis Pegunungan di Pulau Jawa Yang Bermanfaat Untuk Mendukung Pembangunan Wilayah dan Masyarakat.

Cibodas, 30 Desember 2019

Kepala Balai Besar,



Wahju Rudianto, S.Pi., M.Si  
NIP. 19691016 199403 1 001

DAFTAR ISI  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**



---

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	viii

---

### **I. PENDAHULUAN**

A.Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.....	1
B.Struktur Organisasi dan SDM.....	7

---

### **II. ANALASIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN PROGNOSIS TAHUN 2019**

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018.....	12
B. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019....	25

---

### **III. RENCANA KEGIATAN**

A.Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional .....	29
B.Program dan Rencana Kegiatan Tahun 2020 .....	33
C.Pembiayaan .....	44

---

**IV. MONITORING DAN EVALUASI ..... 45**

---

**V. PENUTUP..... 47**

Lampiran-Lampiran

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Balai Besar TNGGP tahun 2019 berdasarkan Wilayah Kedudukan	7
Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai Balai Besar TNGGP tahun 2015- 2019	8
Tabel 3. Rekapitulasi pegawai BBTNGGP tahun 2019 berdasarkan jenjang Pendidikan	9
Tabel 4. Rekapitulasi pegawai BBTNGGP tahun 2019 berdasarkan Umur Pegawai	11
Tabel 5. Rekapitulasi Capaian Kinerja Balai Besar TNGGP Tahun 2018	14
Tabel 6. Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran/DIPA KSDAE Tahun 2018	25
Tabel 7. Prognosis Capaian Kinerja Balai Besar TNGGP Tahun 2019	26
Tabel 8. Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran/ DIPA KSDAE Tahun 2019	28
Tabel 9. Prioritas Nasional Tahun 2020 yang didukung oleh BBTNGGP	31
Tabel 10. Matrik Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Output Satuan Kerja BBTNGGP Tahun 2020	34
Tabel 11. Pagu per kegiatan di dalam DIPA BBTNGGP Tahun 2020	36
Tabel 12. Matrik pagu per Sumber Dana dan per Jenis Belanja	37
Tabel. 13. Distribusi output, komponen, sub komponen serta target lokasi	38

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	4
Gambar 2. Pegawai BBTNGGP 2019 Berdasarkan Kedudukan	8
Gambar 3. Pegawai BBTNGGP 2015 – 2019	9
Gambar 4. Pegawai BBTNGGP 2019 Berdasarkan Jenjang Pendidikan	10

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2020 .....	50
Lampiran 2. Matrik Struktur Pencapaian IKK .....	56

---

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Kawasan konservasi mempunyai peran penting dalam menjaga keutuhan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri atas alam nabati, alam hewani dan fenomena alam. Ketiga sumber daya alam ini mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang tidak dapat digantikan peranannya bagi kehidupan, termasuk bagi kehidupan manusia. Sebagai kawasan konservasi, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) mempunyai peran penting dalam pelestarian jenis satwa, tumbuhan dan ekosistem yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, program-program yang menunjang fungsi dan tujuan konservasi sangat diperlukan.

Dalam konteks pembangunan kehutanan, pengelolaan TNGGP secara menyeluruh dibagi kedalam empat belas kegiatan yaitu; a) pemantapan kawasan (pengukuhan), b) inventarisasi fauna, c) inventarisasi flora, d) penatagunaan kawasan ke dalam zona, e) perlindungan dan pengamanan kawasan, f) pengawetan keanekaragaman hayati, g) pemanfaatan potensi sumber daya alam, h) pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pengelolaan i) pembinaan dan pengembangan daerah penyangga, j) pengembangan kerjasama/kolaborasi pengelolaan kawasan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat, k) peningkatan koordinasi dan integrasi, l) pengelolaan database potensi kawasan, m) pengembangan investasi pemanfaatan dan pengusahaan jasa lingkungan serta n) perancangan dan strategi pendanaan.

Perumusan menghasilkan bahwa visi TNGGP untuk tahun 2019 – 2028 adalah:

**Sebagai Pusat Konservasi Hutan Hujan Tropis Pegunungan di Pulau Jawa yang Bermanfaat untuk Mendukung Pembangunan Wilayah dan Masyarakat.** Untuk mewujudkan Visi tersebut, TNGGP menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mempertahankan ekosistem hutan hujan tropis pegunungan dalam rangka meningkatkan populasi satwa macan tutul, owa jawa, surili, elang jawa dan keanekaragaman hayati lainnya untuk menunjang pengembangan pendidikan dan penelitian;
2. Mengembangkan pendidikan konservasi;
3. Mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan untuk seluruh jenjang umur dan ramah difabel;
4. Menciptakan destinasi pendakian yang berkualitas, aman dan nyaman serta berkelanjutan;
5. Membangun data dan informasi keanekaragaman hayati serta mengembangkan sistem monitoring keanekaragaman hayati yang akurat dan reliable;
6. Mengoptimalkan peran serta kesadaran masyarakat;
7. Mewujudkan fungsi pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam ekosistem hutan hujan tropis pegunungan dalam kerangka cagar biosfer Cibodas bagi kehidupan masyarakat.

Untuk memastikan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem TNGGP berjalan sesuai arah yang benar dan mencapai tujuan serta sasaran yang efektif dan efisien, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan

program dan kegiatan. Salah satu pedoman dimaksud adalah Rencana Kerja (Renja) Balai Besar TNGGP. Dalam melaksanakan pencapaian sasaran strategisnya, Balai Besar TNGGP melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati, dengan kegiatan-kegiatan yang terdiri atas : Kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati, Pengendalian Kebakaran Hutan, Penyidikan dan Pengamanan Hutan serta Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dituangkan dalam dokumen Renja Balai Besar TNGGP.

Renja Balai Besar TNGGP Tahun 2020 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan. Dokumen perencanaan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai Besar TNGGP. Renja Balai Besar TNGGP Tahun 2020 merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020 lingkup Balai Besar TNGGP. Selain digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2020, Renja ini juga selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Balai Besar TNGGP Tahun 2020. Tentu saja dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan kemungkinan akan adanya perubahan arah kebijakan pemerintah dari kabinet yang baru terbentuk serta adanya perubahan-perubahan prioritas dalam APBN Tahun 2020. Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Besar TNGGP pada tahun 2020, sebagaimana pagu alokasi tahun 2020, direncanakan sebesar **Rp. 33.888.016.000,- (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam belas ribu rupiah)**. Alokasi pagu tersebut direncanakan untuk membiayai gaji dan tunjangan, operasional perkantoran dan belanja non operasional perkantoran serta kegiatan SBSN.

# BAB I PENDAHULUAN



---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **a. Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika**

Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 – 2024, yang disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan langkah-langkah strategis pencapaian sasaran kegiatan pada Program Konservasi Sumber Daya Alam dan EKosistem, agar upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasarannya secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat keanekaragaman hayati untuk kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi.

Kawasan konservasi mempunyai peran penting dalam menjaga keutuhan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri atas alam nabati, alam hewani dan fenomena alam. Ketiga sumber daya alam ini mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang tidak dapat digantikan peranannya bagi kehidupan, termasuk bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya menjaga dan mempertahankan kawasan konservasi baik sumberdaya alam hayati maupun ekosistemnya merupakan kewajiban yang mutlak bagi kita.

Upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya meliputi aspek perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan yang dilakukan secara lestari dan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 mengamankan bahwa konservasi sumberdaya alam hayati adalah pengelolaan sumberdaya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Upaya ini dicapai melalui tiga sasaran, yaitu: (1) Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia; (2) Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumberdaya alam hayati bagi kesejahteraan; serta (3) Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya.

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) mempunyai peran penting dalam pelestarian jenis satwa, tumbuhan dan ekosistem yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, program-program yang menunjang fungsi dan tujuan konservasi sangat diperlukan. Dalam konteks pembangunan kehutanan, maka pengelolaan TNGGP secara menyeluruh dibagi kedalam empat belas kegiatan yaitu; a) pemantapan kawasan (pengukuhan), b) inventarisasi fauna, c) inventarisasi flora, d) penatagunaan kawasan ke dalam zona, e) perlindungan dan pengamanan kawasan, f) pengawetan keanekaragaman hayati, g) pemanfaatan potensi sumber

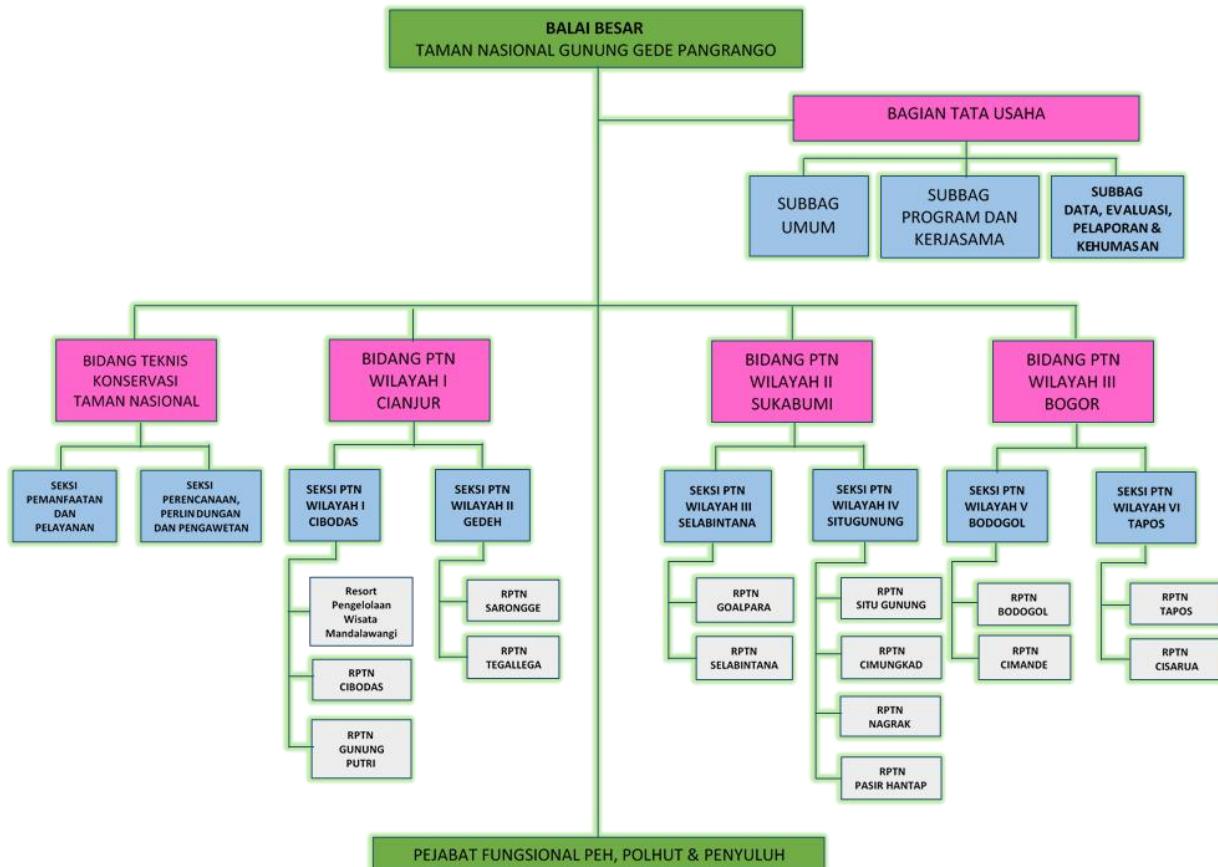
daya alam, h) pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pengelolaan i) pembinaan dan pengembangan daerah penyanga, j) pengembangan kerjasama/kolaborasi pengelolaan kawasan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat, k) peningkatan koordinasi dan integrasi, l) pengelolaan database potensi kawasan, m) pengembangan investasi pemanfaatan dan pengusahaan jasa lingkungan serta n) perancangan dan strategi pendanaan.

Balai Besar TNGGP merupakan organisasi pelaksana teknis pengelolaan taman nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.07/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 10 Februari 2016. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar TNGGP menyelenggarakan fungsi perlindungan untuk sistem penyanga kehidupan, pengawetan keanekaragaman satwa dan tumbuhan serta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari satwa dan tumbuhan serta ekosistemnya. Untuk itu, taman nasional mempunyai peranan sebagai wahana pendidikan, ilmu pengetahuan/teknologi, penelitian, budaya, menunjang budidaya, rekreasi dan pariwisata alam.

Tujuan penyusunan Renja Balai Besar TNGGP Tahun 2020 adalah untuk memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2020 sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Balai Besar TNGGP sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020.

Sistematika Penyusunan Renja Balai Besar TNGGP tahun 2020 ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.82/Menlhk/Setjen/SET.1/11/2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 serta Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/REN.0/12/2019 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Balai Besar TNGGP didukung dengan perangkat organisasi. Struktur organisasi Balai Besar TNGGP seperti pada Gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango  
*Permenhut No. P.03/Menhut-II/2007*

Kondisi kawasan yang terus mengalami perubahan sejak tahun 1995 (awal ditetapkannya Rencana Pengelolaan TNGGP 1995 – 2020) menuntut adanya penyesuaian visi TNGGP. Perumusan menghasilkan bahwa visi TNGGP untuk tahun 2019 – 2028 adalah: **Sebagai Pusat Konservasi Hutan Hujan Tropis Pegunungan di Pulau Jawa yang Bermanfaat untuk Mendukung Pembangunan Wilayah dan Masyarakat.** Untuk mewujudkan Visi tersebut, TNGGP menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mempertahankan ekosistem hutan hujan tropis pegunungan dalam rangka meningkatkan populasi satwa macan tutul, owa jawa, surili, elang jawa dan keanekaragaman hayati lainnya untuk menunjang pengembangan pendidikan dan penelitian;
2. Mengembangkan pendidikan konservasi;
3. Mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan untuk seluruh jenjang umur dan ramah difabel;
4. Menciptakan destinasi pendakian yang berkualitas, aman dan nyaman dan berkelanjutan;
5. Membangun data dan informasi keanekaragaman hayati serta mengembangkan sistem monitoring keanekaragaman hayati yang akurat dan reliable;
6. Mengoptimalkan peran serta kesadaran masyarakat;
7. Mewujudkan fungsi pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam ekosistem hutan hujan tropis pegunungan dalam kerangka cagar biosfer Cibodas bagi kehidupan masyarakat.

Strategi dalam rangka upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem TNGGP berjalan sesuai arah yang benar dan mencapai tujuan serta sasaran yang efektif dan efisien, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Salah satu pedoman dimaksud adalah Rencana Kerja (Renja) Balai Besar TNGGP. Renja Balai Besar TNGGP Tahun 2020 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan.

## **b. Struktur Organisasi dan SDM**

### **Struktur Organisasi**

Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah unit pelaksana teknis yang berada dibawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan Balai Besar Taman Nasional Tipe A dengan susunan organisasi, yaitu:

a. Bagian Tata Usaha;

- Subbagian Umum;
- Subbagian Program dan Kerjasama;
- Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan.

b. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional;

- Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan;
- Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan.

c. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;

- Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
- Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II.

d. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;

- Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III;
- Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV.

e. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III;

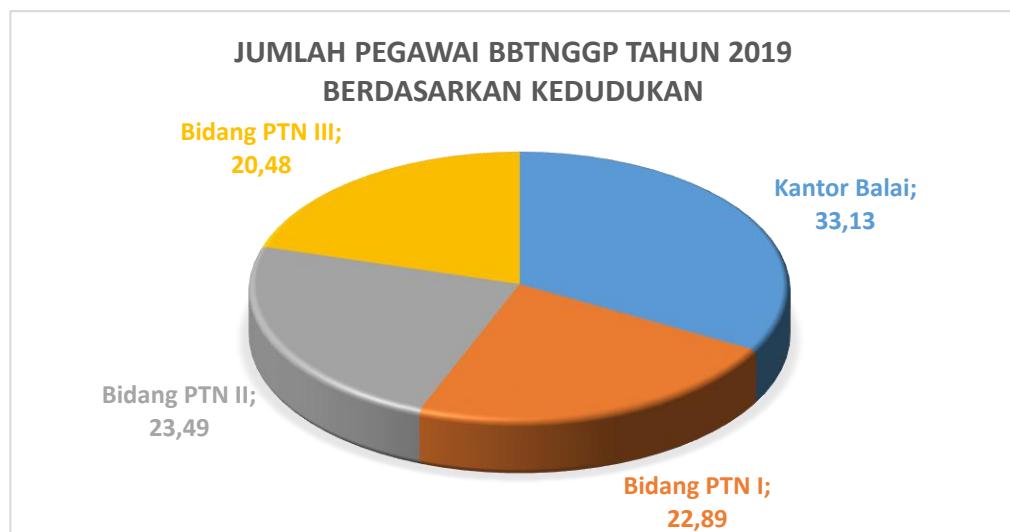
- Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V;
  - Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, pada tahun 2019 Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango didukung pegawai sebanyak 166 orang, yang terdiri dari PNS 119 orang dan PPNPN 47 orang, yang tersebar di 3 (tiga) bidang wilayah dan kantor Balai Besar.

Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Balai Besar TNGGP tahun 2019 berdasarkan Wilayah Kedudukan

Kedudukan	Jumlah Pegawai	Percentase
Kantor Balai	55	33,13 %
Bidang PTN Wilayah I	38	22,89 %
Bidang PTN Wilayah II	39	23,49 %
Bidang PTN Wilayah III	34	20,48 %
<b>TOTAL</b>	<b>166</b>	<b>100.00%</b>



Gambar 2. Pegawai BBTNGGP 2019 Berdasarkan Kedudukan

Jumlah pegawai BBTNGGP dalam kurun waktu antara 2015 sampai dengan 2019 mengalami perubahan. Perubahan tersebut disebabkan oleh pegawai yang memasuki masa pensiun dan pegawai baru/pindahan dari satuan kerja lain. Selama 5 (lima) tahun, dari 2015 sampai dengan 2019, jumlah pegawai tertinggi terdapat pada tahun 2019, yaitu sebanyak 166 orang pegawai, sedangkan jumlah terendah pada tahun 2017 sebanyak 159 orang pegawai.

Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai Balai Besar TNGGP tahun 2015- 2019

No.	Tahun	Jumlah Pegawai
1.	2015	165
2.	2016	162
3.	2017	159
4.	2018	160
5.	2019	166

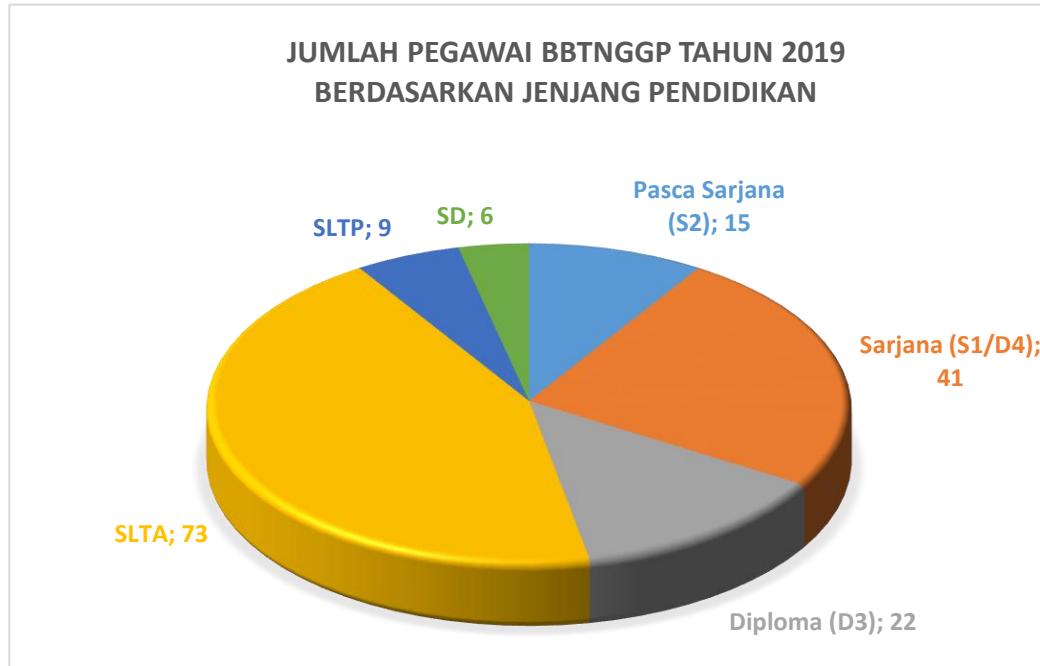


Gambar 3. Pegawai BBTNGGP 2015 – 2019

Pegawai Balai Besar TNGGP pada tahun 2019 terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar hingga Pasca Sarjana. Komposisi terbesar terdapat pada jenjang Pendidikan SLTA sebanyak 73 orang pegawai, sedangkan komposisi terkecil terdapat pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 6 orang pegawai.

Tabel 3. Rekapitulasi pegawai BBTNGGP tahun 2019 berdasarkan jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Pasca Sarjana (S2)	15
2.	Sarjana (S1/D4)	41
3.	Diploma (D3)	22
4.	SLTA	73
5.	SLTP	9
6.	SD	6



Gambar 4. Pegawai BBTNGGP 2019 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sebaran pegawai Balai Besar TNGGP jika dianalisis berdasarkan umur pegawai, urutan terendah ada pada Kelompok Umur I (1 orang), tertinggi ada pada kelompok Umur IV (37 orang). Kelompok umur IV terdiri dari pegawai dengan rentang umur 31 – 35 tahun, sehingga dengan kondisi ini menggambarkan pegawai Balai Besar TNGGP didomini oleh pegawai yang memiliki usia produktif. Hal ini diharapkan berbanding lurus dengan output yang dihasilkan dalam pengelolaan kawasan konservasi, baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan (sekitar daerah penyangga).

Tabel 4. Rekapitulasi pegawai BBTNGGP tahun 2019 berdasarkan Umur Pegawai

No.	Kedudukan	Jumlah Pegawai dalam Kelas Umur										Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1.	Kantor Balai	0	5	4	10	11	8	5	7	5	0	55
2.	Bidang PTN Wil. I	0	1	3	7	7	5	4	4	7	0	38
3.	Bidang PTN Wil. II	0	1	3	10	7	3	3	7	5	0	39
4.	Bidang PTN Wil. III	1	0	2	10	6	3	3	6	3	0	34
<b>Jumlah Pegawai</b>		<b>1</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>166</b>

*Keterangan :*

*I = < 21 thn; II = 21-25 thn; III = 26-30 thn; IV = 31-35 thn; V = 36-40 thn; VI = 41-45 thn; VII = 46-50 thn; VIII = 51-55 thn; IX = 56-59 thn; X = ≥ 60 thn*

BAB II  
ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018  
**BAB II**  
ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018  
DAN  
DAN  
PROGNOSIS TAHUN 2019



---

## **BAB II**

# **ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018**

## **DAN PROGNOSIS TAHUN 2019**

### **a. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018**

Metode untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, adalah dengan melakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan perhitungan sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Perhitungan pengukuran kinerja dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, terdapat kondisi saling ketergantungan yang semu antara besaran realisasi dan persentase pencapaian kinerja. Jika realisasi semakin tinggi maka akan mengakibatkan semakin rendahnya pencapaian kinerja. Kondisi tersebut tidak berlaku mutlak, sehingga perlu adanya modifikasi terhadap rumus yang akan digunakan. Untuk menjawab kondisi tersebut, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kondisi terhadap beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar 150% dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Pencapaian kinerja sasaran strategis pada hakekatnya merupakan hasil pengukuran terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tahun 2018. Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut, dilakukan analisis dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018; Membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Balai Besar TNGGP dan dengan standar nasional. Analisis terhadap penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan serta peningkatan ataupun penurunan kinerja dan solusi alternatifnya. Menganalisa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) serta dampak (*impact*) dari capaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Dalam penggunaan sumber daya, dianalisis juga tingkat efisiensi penggunaannya.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan ini, adalah pengukuran capaian kinerja Balai Besar TNGGP selama periode anggaran Tahun 2018. Hasil pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja kegiatan Balai Besar TNGGP tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pencapaian sasaran kegiatan atau sasaran strategis. Evaluasi penilaian, merujuk pada peraturan MENPAN RB Nomor 35 tahun 2011, tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dengan kategori skoring sebagai berikut :

1. AA : > 85 – 100 (Memuaskan);
2. A : > 75 – 85 (Sangat baik);
3. B : > 65 – 75 (Baik, perlu sedikit perbaikan);
4. CC : > 50 – 65 (Cukup baik, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar);
5. C : > 30 – 50 (Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang tidak mendasar);
6. D : > 0 – 30 (Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar).

Tabel 5. Rekapitulasi Capaian Kinerja Balai Besar TNGGP Tahun 2018

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	
				Jml	%
1.	Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan	2 dokumen	2 dokumen	100,00
2.		Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 dokumen zonasi dan atau blok	1 dokumen	3 dokumen	150,00
3.		Luas zona tradisional pada taman nasional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat	100 ha	100 ha	100,00
4.		Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 desa	2 desa	6 desa	150,00
5.		Persentase gangguan pada kawasan taman nasional berkurang sebesar 15 % per	4 kejadian	2 kejadian	150,00

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	
				Jml	%
	6. Meningkatkan konservasi dan pemeliharaan ekosistem gunung Leuser	tahun dari baseline data tahun 2014 sebanyak 142 kejadian			
6.		Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	1.040 ha	482 ha	46,35
7.		Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2 %	53,12	150
8.		Jumlah sarana prasarana pariwisata alam ( <i>shelter, visitor centre, track, maket, canopy bridge</i> dll) di kawasan konservasi yang termasuk dalam objek wisata prioritas nasional	6 unit	6 unit	100,00
9.		Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,5 poin	90,50 poin	116,77
10.	Sarana Prasarana Ekowisata 3 Taman Nasional Model SBSN		1 unit	1 unit	100,00
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>116,31</b>

Analisis capaian kinerja kegiatan ini, menggambarkan tingkat keberhasilan kegiatan pembangunan Balai Besar TNGGP pada tahun 2018 yang didasarkan pada rencana strategi yang telah ditetapkan pada awal tahun. Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan, diketahui bahwa tingkat capaian kinerja Balai Besar TNGGP tahun 2018 sebesar **116,31 %**. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan tingkat penyerapan anggaran pembangunan di Balai Besar TNGGP termasuk kategori **Memuaskan**.

### **1. Indikator Kinerja Kegiatan 1 : Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Kawasan Konservasi yang Tersusun dan Mendapat Pengesahan Sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan.**

Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pengelolaan taman nasional diperlukan adanya perencanaan yang matang. Oleh karena itu Balai Besar TNGGP menempatkan perencanaan pengelolaan kawasan sebagai salah satu target kinerja kegiatan dalam Renstra Balai Besar TNGGP Tahun 2015 – 2019. Pada tahun ke empat periode Renstra 2015 -2019, Balai Besar TNGGP menargetkan pembuatan dokumen Rencana Pengelolaan sebanyak 2 (dua) dokumen, dan berhasil disusun 2 (dua) dokumen, yaitu dokumen review Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (penyesuaian dengan situasi dan kondisi terkini) sebanyak 1 (satu) dokumen, dan 1 (satu) dokumen Rencana Kerja Tahun 2019, dengan demikian capaian **Kinerja Kegiatan Indikator ke-1** ini mencapai **100,00 %** tergolong dalam kategori **Memuaskan**. Untuk IKK ke-1 ini, Balai Besar TNGGP menggunakan anggaran sebesar Rp. 307.745.000,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 313.365.000,-, efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.620.000,-, atau 1,79 %.

**2. Indikator Kinerja Kegiatan 2 : Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Tersusun dan Mendapat Pengesahan Sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan atau Blok.**

Agar pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dapat dilaksanakan secara efektif dan efisiensi serta sesuai dengan kondisi lapangan diperlukan adanya pembagian zonasi, dilanjutkan dengan penyusunan desain tapak. Oleh karena itu Balai Besar TNGGP menempatkan penyusunan dokumen perencanaan (zonasi dan turunannya), menjadi salah satu target kinerja kegiatan dalam Renstra Balai Besar TNGGP Tahun 2015 – 2019. Pada tahun ke empat periode Renstra 2015 -2019, Balai Besar TNGGP menargetkan pembuatan dokumen zonasi sebanyak 1 (satu) dokumen, yaitu penyusunan desain tapak, dan berhasil direalisasikan sebanyak 3 (tiga) dokumen, yaitu dokumen Desain Tapak Pasir Sumbul, Situgunung dan dokumen Desain Tapak Bodogol. Dengan demikian capaian **Kinerja Kegiatan Indikator ke-2** ini mencapai **150,00 %** tergolong dalam kategori **Memuaskan**. Dalam upaya pelaksanaan capaian IKK ke-2 ini, Balai Besar TNGGP menggunakan anggaran sebesar Rp. 101.413.000,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 101.413.000,-, jadi dalam pencapaian kinerja indikator ke-2 ini penggunaan anggaran termasuk sangat efisien.

### **3. Indikator Kinerja Kegiatan 3 : Luas Kawasan Konservasi Pada Zona Tradisional yang Dikelola Melalui Kemitraan Dengan Masyarakat Seluas 100.000 ha.**

Tingkat perekonomian masyarakat desa di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), pada saat ini masih relatif rendah, sehingga banyak terjadi interaksi negatif antara masyarakat dengan hutan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak Balai Besar TNGGP, berusaha meningkatkan sosial ekonomi masyarakat melalui pembinaan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) secara tradisional (di zona tradisional) yang telah dilakukan sejak lama sebelum areal ini menjadi bagian dari kawasan di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (eks Hutan Perum Perhutani). Dengan harapan ada peningkatan kondisi sosial ekonomi, sehingga tingkat gangguan masyarakat terhadap hutan bisa diminimalisir. Oleh karena pentingnya, peningkatan sosial ekonomi masyarakat dan ada peluang untuk pemanfaatan potensi alam, maka kegiatan pemanfaatan potensi alam di zona tradisional dimasukan sebagai indikator kinerja kegiatan, yaitu Indikator Kinerja Kegiatan ke-3 “*Luas Kawasan Konservasi Pada Zona Tradisional yang Dikelola Melalui Kemitraan Dengan Masyarakat Seluas 100.000 ha.*”. Untuk mencapai IKK ke-3 ini, pada tahun 2018, Balai Besar TNGGP menargetkan luas zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat 100 (seratus) ha, dan terealisasi seluas 63,18 (enam puluh tiga koma delapan belas) ha di Resort PTN Bodogol, dan 36,82 (tiga puluh enam koma delapan puluh dua) ha di Resort PTN Cisarua, jadi capaian **Indikator Kinerja Kegiatan ke-3** sebesar **100,00 %** dengan kategori **Memuaskan**. Capaian IKK ke-3 yang memuaskan ini, tidak lepas dari upaya pelaksanaan semua kegiatan pendukung yang menggunakan

anggaran sebesar Rp. 218.358.500,-, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 221.665.000,-. Efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.306.500,- atau 1,49 %.

#### **4. Indikator Kinerja Kegiatan 4: Jumlah Desa di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi yang Dibina Sebanyak 50 Desa Selama 5 Tahun.**

Sampai saat ini interaksi negatif antara masyarakat dengan hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, lebih banyak disebabkan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih relatif rendah. Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak Balai Besar TNGGP, berusaha meningkatkan sosial ekonomi masyarakat melalui pembinaan desa penyangga berupa pemberdayaan masyarakat. Diharapkan dengan adanya peningkatan kondisi sosial ekonomi, tingkat gangguan masyarakat terhadap hutan bisa diminimalisir. Oleh karena pentingnya, pembinaan desa penyangga ini, maka kegiatan ini dimasukan sebagai indikator kinerja kegiatan, yaitu Indikator Kinerja Kegiatan ke-4 “*Jumlah Desa di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi yang dibina Sebanyak 50 Desa Selama 5 Tahun*”. Untuk merealisasikan target capaian IKK ke-4 ini, pada tahun 2018, Balai Besar TNGGP telah melaksanakan pembinaan untuk 7 (tujuh) dari target 2 (desa), jadi capaian **Indikator Kinerja Kegiatan ke-4** lebih **150,00 %** dengan kategori **Memuaskan**.

Capaian IKK ke-4 yang memuaskan ini, tidak lepas dari upaya pelaksanaan semua kegiatan pendukungnya yang menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.040.994.400,-, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.062.925.000,-. Jadi dalam hal ini terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar sebesar Rp. 21.930.600,- atau sekitar 2,06 %.

**5. Indikator Kinerja Kegiatan 5: Persentase Gangguan Pada Kawasan Konservasi taman Nasional Berkurang Sebesar 15 % per Tahun Dari Tahun 2014 Sebanyak 142 Kejadian.**

Bila konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi nasional tidak segera diatasi akan berakibat fatal. Rusaknya satu mata rantai ekosistem dalam kawasan konservasi akan berakibat pada kerusakan sistem yang terjadi di kawasan yang bersangkutan. Padahal kawasan konservasi mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat vital bagi kelangsungan dan kesejahteraan umat manusia, baik sebagai pelindung sistem penyanga kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah, maupun permanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan demikian penurunan konflik dan tekanan pada kawasan hutan merupakan satu dari beberapa syarat mutlak dalam pengelolaan taman nasional. Mengingat hal tersebut, maka pada tahun 2018, Balai Besar TNGGP memasukan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan sebagai salah satu kegiatan prioritas dan dimasukan pada Indikator Kinerja Kegiatan ke-5, “*Persentase Gangguan Pada Kawasan Konservasi taman Nasional Berkurang Sebesar 15 % per Data Tahun 2014 Sebanyak 142 Kejadian*”. Untuk merealisasikan capaian IKK Ke-5 ini Balai Besar TNGGP telah menyelesaikan 7 (tujuh) dari 7 (tujuh) jenis kegiatan atau 100 % dari yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar TNGGP pada Dirjen KSDAE. Hasilnya cukup baik, pada tahun 2018 tidak ditemukan kasus pelanggaran yang berarti, jadi capaian **Indikator Kinerja Kegiatan ke-5** ini adalah **150,00 %** termasuk kategori **Memuaskan**. Untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan pendukung IKK ke-5 ini digunakan anggaran sebesar Rp. 1.528.520.000,- dari

jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.393.137.000,-. Dari segi pendanaan, mengefisienkan anggaran sebesar Rp. 135.383.000,- atau 8,86 6 %.

## **6. Indikator Kinerja Kegiatan 6: Luas Kawasan Konservasi Terdegradasi yang Dipulihkan Kondisi Ekosistemnya Seluas 100.000 ha**

Dengan adanya alih fungsi kawasan dari hutan produksi dan hutan lindung (eks Perum Perhutani) menjadi kawasan konservasi (pengelolaannya menjadi tanggungjawab Taman Nasional Gunung Gede Pangrango), maka lahan di kawasan Taman Nasional ini banyak yang mengalami degradasi. Luas lahan terdegradasi pada saat alih fungsi tahun 1999, ± 2.707,74, meskipun upaya pemulihan terus dilakukan, namun sampai tahun 2017 belum bisa seluruhnya dipulihkan. Mengingat fungsi dan manfaat kawasan konservasi ini sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia, maka keberadaan dan keutuhannya harus terus dijaga. Untuk itu Balai Besar TNGGP memprioritaskan pemulihan ekosistem terdegradasi dan memasukannya menjadi Indikator Kinerja Kegiatan dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tahun 2018 (IKK ke-6). Untuk mendukung keberhasilan upaya restorasi kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di eks kawasan Perum Perhutani (kawasan alih fungsi), pada tahun 2018 ini Balai Besar TNGGP melaksanakan pemulihan eksosistem seluas 482 ha, dari target seluas 1.040 ha, pada areal perluasan eks Perum Perhutani, melalui mekanisme pemulihan alami. Jadi realisasi **IKK ke-6** (Luas Kawasan Konservasi Terdegradasi yang Dipulihkan Kondisi Ekosistemnya Seluas 10.000 ha) mencapai angka **46,35 %**, atau masuk kategori **Agak Kurang**. Untuk merealisasikan target

capaian IKK ke-6 ini, Balai Besar TNGGP menggunakan anggaran sebesar Rp. 459.933.000,- dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 479.673.000,-. Jadi dalam hal penggunaan anggaran terjadi efisiensi keuangan sebesar Rp. 19.740.000,- atau sebesar 2,76 %. Meskipun target tidak tercapai, namun penggunaan anggaran masih tergolong efisien, sebab besarnya anggaran sebanding (bahkan lebih besar) dari biaya yang dipakai untuk pemulihan ekosistem seluas 482 ha. Target tidak tercapai karena ada kesepakatan baru bahwa upaya pemulihan ekosistem dikerjakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, jadi anggaran untuk IKK ke-6 Balai Besar TNGGP dikurangi.

## **7. Indikator Kinerja Kegiatan 7.: Presentase Peningkatan Populasi 25 Spesies Satwa Terancam Punah (sesuai *The IUCN Red List of Threatened Prioritas Species*) Sebesar 10 % dari *Baseline Data* Tahun 2013**

Potensi sumber daya alam hayati TNGGP yang cukup tinggi sudah banyak diketahui, baik dari hasil penelitian orang asing dimasa lalu, maupun penelitian selanjutnya oleh warga NKRI. Dari literatur yang ada dan hasil penilaian potensi serta inventarisasi tumbuhan dan satwa liar, diketahui bahwa di kawasan TNGGP terdapat species satwa dan tumbuhan yang terancam punah, antara lain owa jawa, macan tutul, elang jawa, surili, katak merah, raflesia, kantong semar, dan kiaksara urat kuning. Diantara berbagai jenis satwa langka terancam punah tersebut, terpilih tiga jenis satwa sebagai *flag species* dan satwa prioritas, yaitu owa jawa (*Hylobates moloch*), macan tutul (*Panthera pardus*), dan elang jawa (*Spizaitus bartelsi*). Mengingat populasinya di alam cenderung menurun, maka Balai Besar TNGGP berupaya terus untuk mempertahankan dan meningkatkan populasi satwa terancam punah ini, sehingga

memasukkannya menjadi salah satu indikator kinerja kegiatan, yaitu, “*Presentase Peningkatan Populasi 25 Spesies Satwa Terancam Punah (sesuai The IUCN Red List of Threatened Prioritas Species) Sebesar 10 % dari Baseline Data Tahun 2013*”.

Pada tahun 2018, Balai Besar TNGGP mentargetkan peningkatan populasi species terancam punah prioritas sebesar 2 % dan berhasil meningkatkan populasi satwa dimaksud sebesar 53,12 %. Dengan demikian maka realisasi kegiatan **IKK ke-7** mencapai angka lebih dari **150 %**, atau masuk kategori **Memuaskan**. Untuk merealisasikan target capaian IKK ke-7 ini, Balai Besar TNGGP menggunakan dana sebesar Rp. 384.830.400,- dari anggaran yang tersedia Rp. 385.404.000,-, dengan demikian penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja IKK ke-7 ini termasuk efisien.

#### **8. Indikator Kinerja Kegiatan 8 : Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata Alam (shelter, visitor centre, track, maket, canopy bridge dll) di Kawasan Konservasi yang Termasuk Dalam Objek Wisata Prioritas Nasional**

Letak kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memang strategis, dikelilingi pemukiman padat penduduk, dekat dengan kota-kota besar, seperti Ibu Kota NKRI Jakarta, Ibu Kota Propinsi Jabar, mudah dijangkau dari Ibu Kota Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi. Dengan kondisi seperti itu, mengakibatkan Taman Nasional ini banyak diminati masyarakat, jumlah pengunjung tiap tahunnya cenderung naik terus. Untuk melayani kebutuhan masyarakat, khususnya khususnya bidang wisata alam, Balai Besar TNGGP perlu menyiapkan berbagai fasilitas yang bisa menunjang keamanan dan kenyamanan para wisatawan, menunjang kegiatan usaha pariwisata alam dan menjamin keamanan serta kelestarian kawasan konservasi. Oleh karena itu, Balai Besar

TNGGP memasukan kegiatan penyiapan fasilitas wisata alam ini ke dalam salah satu indikator kinerja kegiatan, yaitu IKK ke-8, ” *Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata Alam (shelter, visitor centre, track, maket, canopy bridge dll) di Kawasan Konservasi yang Termasuk Dalam Objek Wisata Prioritas Nasional* ”.

Pada tahun 2018, Balai Besar TNGGP merencanakan pembangunan fasilitas umum pariwisata sebanyak 14 (empat belas) paket, dan terealisasi sebanyak 17 (tujuh belas) paket. Dengan demikian nilai capaian **Indikator Kinerja Kegiatan ke-8** sebesar **123,08 %** tergolong dalam kategori **Memuaskan**.

Dalam pengembangan jaringan jalan di areal wisata Situgunung ini, dilakukan 25 (dua puluh lima) kegiatan pendukung, dengan biaya sebesar Rp. 27.474.587.150,- dari biaya yang tersedia sebesar Rp. 27.866.631.000,-, jadi dalam hal ini terjadi penghematan atau efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 77.948.000,- atau sekitar 1,41 %.

## **9. Indikator Kinerja Kegiatan 9 : Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE Minimal 78,00 (A)**

Sebagai instansi pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, tentunya Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango perlu didukung kapasitas kelembagaan yang memadai, proporsional dan efektif. Sebagai instansi pemerintah tentunya pula, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango perlu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya alam. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Oleh karena itu, salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai

Balai Besar TNGGP pada tahun 2018, adalah mewujudkan kapasitas kelembagaan yang memadai, proporsional dan efektif, melalui **Indikator Kinerja Kegiatan ke-9**, yaitu “*Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE Minimal 78,00*”. Dari hasil penilaian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas, Balai Besar TNGGP (dengan nilai 90,50) tergolong dalam kategori **Memuaskan** dengan nilai capaian kinerja sebesar **116,03 %**. Untuk mendukung realisasi kegiatan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ke-9 ini, digunakan anggaran sebesar Rp. 19.858.690.880,-, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 23.207.870.000,- jadi ada penghematan sebesar Rp. 43.058.560.880,- atau terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar 3,52 %.

Secara rinci pencapaian realisasi anggaran Balai Besar TNGGP tahun 2018, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran/DIPA KSDAE Tahun 2018

No	Sumber Dana	Alokasi	Realisasi		
			Rp.	% Keu	% Fisik
1.	Rupiah Murni (RM)	25.786.698.000	22.672.840.929	87,93	<b>100,00</b>
2.	PNBP	2.686.000.000	2.552.993.699	95,05	<b>100,00</b>
3.	SBSN	25.382.806.000	25.051.366.900	98,69	<b>100,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>51.172.190.000</b>	<b>50.277.201.528</b>	<b>98,26</b>	<b>100,00</b>

### b. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019

Capaian Kinerja Balai Besar TNGGP Tahun 2019 yang merupakan pengukuran pencapaian kinerja instansi, dihitung berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun. Hasil pengukuran kinerja ini memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran kegiatan Balai Besar

TNGGP. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Balai Besar TNGGP Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 7. Prognosis Capaian Kinerja Balai Besar TNGGP Tahun 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	
				Jml	%
1.	Terjaminnya efektivitas pengelolaan hutan taman nasional	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 desa	2 desa	6 desa	150,00
2.		Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional pada taman nasional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 ha	100 ha	138,67 ha	138,67
3.		Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 provinsi	1 provinsi (15 resort)	1 provinsi (15 resort)	100,00
4.		Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2 %	23,04 %	150,00
5.		Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa ( <i>sanctuary</i> ) species terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit	1 unit pengelola	1 unit pengelola	100,00
6.		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi	1.000	1.756	150,00

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	
				Jml	%
	7.	minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	orang		
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	200.000 orang	412.574 orang	150,00
		Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	78,00 poin	90,5 poin	116,03
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>				<b>131,84</b>	

Analisis capaian kinerja kegiatan ini, menggambarkan tingkat keberhasilan kegiatan pembangunan Balai Besar TNGGP pada tahun 2019 yang didasarkan pada rencana yang telah ditetapkan pada awal tahun. Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan, diketahui bahwa tingkat capaian kinerja Balai Besar TNGGP tahun 2019 sebesar **131,84 %**. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan tingkat penyerapan anggaran pembangunan di Balai Besar TNGGP termasuk kategori **Memuaskan**.

Untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, pada tahun 2019 Balai Besar TNGGP melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional (yang didalamnya mencakup empat kegiatan dari Program Ditjen KSDAE), dengan delapan indikator kinerja kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.

23.337.797.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan sumber dana terdiri dari:

Rupiah Murni : Rp. 22.706.979.000,-

PNBP : Rp. 631.000.000,-

Secara rinci pencapaian realisasi anggaran Balai Besar TNGGP tahun 2019, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran/ DIPA KSDAE Tahun 2019

No.	Sumber Dana	Alokasi (Rp.)	Realisasi		
			Rp.	% Keu	% Fisik
1.	Rupiah Murni (RM)	22.706.979.000	22.375.329.659	98,54	100
2.	PNBP	631.000.000	618.581.812	98,03	100
	<b>Jumlah</b>	<b>23.337.797.000</b>	<b>22.993.911.471</b>	<b>98,53</b>	<b>100</b>

BAB III

**RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020**



---

## **BAB III**

### **RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020**

#### **a. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional**

Pelaksanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 salah satunya adalah dengan melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang di dalamnya memuat Proyek Prioritas Nasional. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk Tahun 2020 mengusung tema utama "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas". Tahun 2020, peranan KLHK ada di dalam Prioritas Nasional (PN) yang sama dengan Tahun 2019 namun terdapat perbedaan detail di dalam nomenklatur. Hal ini bertujuan untuk meng sinkronisasikan realisasi rencana kerja tahun sebelumnya dengan rencana kerja tahun berikutnya sesuai dengan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. KLHK mengintegrasikan pembangunan dalam rencana kerja pemerintah Tahun 2020, dimana posisi pembangunan LHK diintegrasikan dalam 3 (tiga) dari 5 (lima) Prioritas Nasional, yaitu :

- 1) Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
- 2) Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, dan
- 3) Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup.

Pembangunan tematik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 mendukung RKP 2020 meliputi Kesetaraan Gender, Tata Kelola, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial Budaya, dan Tranformasi Digital. Target Pembangunan Tahun 2020 yaitu pertumbuhan ekonomi 5.3-5.5%, tingkat kemiskinan 8-9%, tingkat pengangguran terbuka 4.7-5.1%, indeks pembangunan manusia 72.5, dan indeks gini 0.375-0.38.

Terhadap 3 (tiga) Prioritas Nasional yang dimandatkan kepada KLHK, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) mendapat mandat untuk melaksanakan 2 (dua) Prioritas Nasional, yaitu:

- 1) Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, dan
- 2) Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup.

Strategi untuk mendukung Prioritas Nasional Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, strategi Direktorat Jenderal KSDAE adalah dengan melaksanakan kegiatan peningkatan populasi spesies terancam punah dan operasionalisasi *Wildlife Rescue Unit* (WRU) bersama masyarakat, serta pengembangan ekowisata dan wisata bahari pada KK, baik yang termasuk dalam 7 (tujuh) Destinasi Wisata Prioritas dan 2 (dua) Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata maupun tidak melalui mekanisme pendanaan APBN dan SBSN.

Sedangkan untuk mendukung Prioritas Nasional Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, strategi Direktorat Jenderal KSDAE adalah dengan melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi bersama masyarakat dalam kegiatan pemolaan dan penataan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, pembentukan dan pelaksanaan fungsi kelembagaan ekosistem esensial, serta pengelolaan kawasan konservasi di daerah penyangga atau *buffer zone*, kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi, pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi, serta pemanfaatan jasa lingkungan energi air dari mini/mikro hidro.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Satuan Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) pada tahun 2020 mewujudkan dukungan terhadap Prioritas Nasional melalui pelaksanaan rangkaian kegiatan di tingkat tapak. Klasifikasi output kegiatan BBTNGGP terhadap Prioritas Nasional, dapat dilihat pada matriks di bawah ini.

Tabel 9. Prioritas Nasional Tahun 2020 yang didukung oleh BBTNGGP

Program Prioritas	Keg. Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Output	Target	Satuan Target	Alokasi Anggaran x Rp.1.000,-	%
<b>1. PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja</b>						<b>5.787.000</b>	<b>46,63%</b>
Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan DPP Baru	Jumlah destinasi wisata alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan	1	Destinasi	645.000	
		Pengembangan klaster destinasi wisata alam berbasis hutan dan ekosistem di dalamnya	Jumlah lokasi pengembangan sarpras pengembangan DPP Model SBSN	1	Unit	5.142.000	
<b>2. PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup</b>						<b>6.621.076</b>	<b>53,36%</b>
Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Penataan Kawasan Hutan	Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa	Luas Kawasan sebagai Penyediaan Data, Informasi, dan Rencana Konservasi Nasional di dalam	4.935	Hektar	27.250	

Program Prioritas	Keg. Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Output	Target	Satuan Target	Alokasi Anggaran	%
						x Rp.1.000,-	
		Kawasan konservasi					
		Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif	2	Desa		251.360	
		Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	2	Unit KK		1.650.000	
	Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya	Pemulihan dan konservasi daerah tangkapan air	Luas area kawasan konservasi yang ditangani permasalahannya	150	Hektar	3.887.716	
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanelekragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanelekragaman Spesies dan Genetik TSL	12	Hektar	804.750	
						12.408.076	100%

Pelaksanaan Prioritas Nasional ke-3 yaitu Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.787.000.000,- atau 46,63% dari seluruh anggaran Prioritas Nasional BBTNGGP.

Program prioritas yang didukung yaitu Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi melalui output :

1. Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan
2. Jumlah Lokasi Pengembangan Sarpras Pengembangan DPP Model SBSN

Persentase anggaran PN sebesar 53,36% atau sebesar Rp. 6.621.076.000,- dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional ke-4 yaitu Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup. Satuan Kerja BBTNGGP melaksanakan 2 (dua)

Program Prioritas, yaitu Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Pelaksanaan Program Prioritas Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air diimplementasikan melalui output :

1. Luas Kawasan sebagai Penyediaan Data, Informasi, dan Rencana Konservasi Nasional di dalam Kawasan konservasi
2. Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif
3. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya
4. Luas area kawasan konservasi yang ditangani permasalahannya

Sedangkan pelaksanaan Program Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup diimplementasikan melalui output Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL.

**b. Program dan Rencana Kegiatan Tahun 2020**

Pagu alokasi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) Tahun 2020 didasarkan pada kemampuan dan potensi satuan kerja dalam mengimplementasikan fungsi terkait pencapaian target Prioritas Nasional (PN). Alokasi pagu BBTNGGP tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 33.888.016.000,-**. (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam belas ribu rupiah). Alokasi pagu tersebut merupakan bagian dari upaya pencapaian Sasaran Kegiatan, serta pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (5419)
2. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (5420)
3. Pengelolaan Kawasan Konservasi (5421)
4. Konservasi Spesies dan Genetik (5422)
5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (5423)

Tabel 10. Matrik Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Output

Satuan Kerja BBTNGGP Tahun 2020

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Output
<b>5419-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem</b>			
	01-Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	01-Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 80,00 Poin	5419.950 (Non PN) Layanan dukungan manajemen eselon I  5419.951 (Non PN) Layanan sarana dan prasarana internal  5419.994 (Non PN) Layanan perkantoran
<b>5420-Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam</b>			
	01-Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi  Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi  03-Jumlah simpul data keanekaragaman hayati yang dikembangkan	5420.002 (PN 4) Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi  5420.003 (PN 4) Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi
<b>5421-Pengelolaan Kawasan Konservasi</b>			
	01-Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru	01-Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif  02-Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani	5421.001 (PN 4) Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya  5421.002 (PN 4) Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif  5421.003 (PN 4)

	03-Jumlah Luas area KK yang ditangani melalui kemitraan dan Pemulihian Ekosistem	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya
	04-Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	
<b>5422-Konservasi Spesies dan Genetik</b>		
01-Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetic	01-Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	5422.001 (PN 4) Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL
	02-Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	
	03-Jumlah entitas perlindungan dan Pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	
	04-Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati	
	05-Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun	
<b>5423-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi</b>		
01-Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi	Jumlah destinasi wisata alam prioritas	5423.001 (PN 3) Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan
	Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam	5423.004 (PN 3) Jumlah Lokasi Pengembangan Sarpras Pengembangan DPP Model SBSN
	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education	
	Jumlah destinasi wisata alam bahari	

Kebijakan alokasi anggaran tidak lagi mengacu pada *money follow function*, tetapi telah bertransformasi menjadi *money follow program* yang artinya pengalokasian anggaran lebih ditekankan pada pencapaian keberhasilan program-program prioritas sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus mendapatkan pengalokasian anggaran secara merata. Penganggaran berbasis Program Prioritas Nasional merupakan pendekatan dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang menunjukkan alokasi penganggaran hanya mengacu pada pencapaian target prioritas

yang dicanangkan oleh Presiden bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan penerapan pendekatan penganggaran berbasis prioritas nasional, maka titik berat pembiayaan sesuai lokasi target PN di masing-masing Satuan Kerja.

Penyusunan RKA dengan pendekatan penganggaran berbasis program Prioritas Nasional perlu didukung dengan dokumen Rencana Kerja yang matang sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terpetakan dengan baik dan mendukung program Prioritas Nasional tersebut. Alokasi anggaran Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk tahun 2020 sebesar Rp. 33.888.016.000,- (Tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam belas ribu rupiah). Pagu per kegiatan dapat dilihat pada matrik berikut :

Tabel 11. Pagu per kegiatan di dalam DIPA BBTNGGP Tahun 2020

No.	Kegiatan	Pagu (Rp) ( x 1.000)	Persentase (%)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas			
1	Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	21.286.640	62,81
2	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	220.550	0,65
3	Pengelolaan Kawasan Konservasi	5.789.076	17,08
4	Konservasi Spesies dan Genetik	804.750	2,37
5	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	5.787.000	17,08
<b>Jumlah</b>		<b>33.888.016</b>	<b>100</b>

Berdasarkan matrik di atas, alokasi pagu terbesar terdapat pada kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen KSDAE sebesar 62,81 % dari total pagu BBTNGGP Tahun 2020. Sedangkan kegiatan Pemolaan dan informasi konservasi alam memiliki pagu terkecil yaitu sebesar 0,65% dari total pagu

BBTNGGP Tahun 2020.

Distribusi pagu BBTNGGP Tahun 2020 dapat dipetakan menurut sumber dana, yang dapat dilihat pada matrik berikut :

Tabel 12. Matrik pagu per Sumber Dana dan per Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	RM	PNBP	SBSN	Jumlah	%
1	Belanja Pegawai	14.630.000.000	-	-	14.630.000.000	43.17%
2	Belanja Operasional	5.006.000.000	-	-	5.006.000.000	14.77%
3	Belanja Non Ops./Modal	5.737.516.000	3.372.500.000	5.142.000.000	14.252.016.000	42.06%
Total Pagu Anggaran		25.373.516.000	3.372.500.000	5.142.000.000	33.888.016.000	100%
% Per Sumber Dana		74.87%	9.95%	15.17%	100%	

Berdasarkan matrik di atas, alokasi untuk Belanja Pegawai memiliki persentase yang paling tinggi, yaitu sebesar 43,17%. Komposisi Rupiah Murni (RM) untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 25.373.516.000.- atau sebesar 74,87% dari total pagu BBTNGGP Tahun 2020. Selain hal tersebut, pada Tahun 2020, BBTNGGP mendapat kesempatan untuk melaksanakan pembangunan Proyek SBSN Sanctuary Elang Jawa, sebesar Rp. 5.142.000.000.-

Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Tahun 2020 seluruh kegiatan UPT merupakan turunan dari sasaran kegiatan Direktorat Teknis, sehingga seluruh komponen serta sub komponen secara langsung bertujuan untuk

mendukung target Direktorat Teknis. Berdasarkan hal tersebut, seluruh komponen dan sub komponen di BBTNGGP pada dasarnya adalah penjabaran dari sasaran kegiatan Direktorat Teknis yang ada di KSDAE.

Selain hal tersebut di atas, pada tahun 2020 diharapkan pelaksanaan anggaran sudah berbasis spasial, sehingga dapat dilihat dengan jelas daerah mana yang dijadikan target pelaksanaan kegiatan.

Tabel. 13. Distribusi output, komponen, sub komponen serta target lokasi

No.	Output	Komponen	Sub Komponen	Target Lokasi
1.	5419.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I [Base Line]	051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	Penyusunan Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2021	Kantor Balai Besar
			Rapat Penyusunan RKA-K/L 2021	Kantor Balai Besar
			Sosialisasi peraturan terkait Revisi DIPA dan Pencairan Anggaran TA 2020	Kantor Balai Besar
		052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2019	Kantor Balai Besar
			Penyusunan Laporan Capaian Renja 2019 dan Progres Capaian Renstra 2015-2019	Kantor Balai Besar
			Penyusunan Laporan Statistik Tahun 2019	Kantor Balai Besar
		054 Pengelolaan keuangan	Bimbingan teknis penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPj) Pelaksanaan Kegiatan TA 2020	Kantor Balai Besar
			Penyusunan Laporan Keuangan SAI dan SIMAK (Bulanan, Semester, Unaudited dan Audited)	Kantor Balai Besar
			Fasilitasi Perbendaharaan dan Kesekretariatan DIPA	Kantor Balai Besar
		057 Pengelolaan kepegawaian	Pengelolaan PNBP	Kantor Balai Besar
			Pemutakhiran Data Kepegawaian	Kantor Balai Besar
			Manajemen e-library	Kantor Balai Besar
			Penyelenggaraan Penilaian	Kantor Balai Besar

No.	Output	Komponen	Sub Komponen	Target Lokasi
		058 Pelayanan umum dan perlengkapan	DUPAK Jabatan Fungsional	
			Pengelolaan Barang Persediaan dan Barang Milik Negara	Kantor Balai Besar
			Penatausahaan BMN	Kantor Balai Besar
			Penyusunan Laporan BMN (Semesteran)	Kantor Balai Besar
			Penghapusan Barang Milik Negara	Kantor Balai Besar
			Peningkatan kapasitas pegawai melalui sosialisasi eco-office	Kantor Balai Besar
			Penyusunan laporan Wasdal dan PSP	Kantor Balai Besar
	5419.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Penyempurnaan audio visual ruang film dan sarana tele-conference pendukung kegiatan penelitian dan pendidikan lingkungan	Kantor Balai Besar
			Pembuatan video pendek dokumenter kawasan	Kantor Balai Besar
		054 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	Renovasi Kantor Bidang PTN Wilayah II	Bidang PTN Wilayah II
	5419.994 Layanan Perkantoran [Base Line]	001 Gaji dan Tunjangan	Pembayaran gaji dan tunjangan	Kantor Balai Besar
		002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Keperluan sehari-hari perkantoran	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Langganan Daya dan Jasa	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Honorarium Pengelola DIPA	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Honorarium PPNPN	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Biaya perjalanan Dinas Pimpinan	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
	5420.002 Luas Kawasan sebagai penyediaan	053	Pemantauan fungsi KK melalui Rakor Cagar Biosfer Cibodas	Kantor Balai Besar



No.	Output	Komponen	Sub Komponen	Target Lokasi
	Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi [Base Line]	Jumlah rekomendasi pemantauan (monitoring) dan pemantapan fungsi KK		
	5420.003 Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi [Base Line]	051 Penataan Zonasi/Blok Kawasan Konservasi	Pemantapan fungsi dan identifikasi potensi zona di kawasan konservasi lingkup TNGGP	Kantor Balai Besar
			Pemantapan fungsi KK melalui Penyusunan desain tapak	Kantor Balai Besar
			Pemantauan fungsi KK melalui fasilitasi konsultasi dan koordinasi keteknisan	Kantor Balai Besar
		053 Kerjasama di Kawasan Konservasi	Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama	Kantor Balai Besar
			Evaluasi Perjanjian Kerjasama	Kantor Balai Besar
	5421.001 Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya [Base Line]	051 Pemberian Akses Kelola kepada Masyarakat di sekitar KK	Monitoring kemitraan konservasi	Kantor Balai Besar
			Pendampingan pembinaan desa konservasi penerima akses pemanfaatan HHBK	Kantor Balai Besar
		052 Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa	Pendampingan/pembinaan/penilaian kelompok tani hutan (KTH) binaan TNGGP	Kantor Balai Besar
			Penyusunan Master Plan Pemberdayaan Masyarakat	Kantor Balai Besar
			Koordinasi penyuluhan kehutanan	Kantor Balai Besar
			Penyusunan RKT kelompok masyarakat	Kantor Balai Besar
			Monitoring progres pemberdayaan masyarakat	Kantor Balai Besar
			Pendampingan/pembinaan/penilaian kelompok tani hutan (KTH) binaan TNGGP	Kantor Balai Besar
			Penyusunan Master Plan Pemberdayaan Masyarakat	Kantor Balai Besar
	5421.003 Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya [Base Line]	051 Perencanaan kelola Kawasan Konservasi	Penyusunan Dokumen RPJPN	Kantor Balai Besar
			Perencanaan dan evaluasi	Kantor Balai Besar



No.	Output	Komponen	Sub Komponen	Target Lokasi
			pengelolaan KK melalui Rakor Gede Pahala	
			Visitasi Learning Organization terkait pengelolaan Desa Wisata/Eco-Village dalam rangka Peningkatan Kapasitas PEH TNGGP	Kantor Balai Besar
		052 Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	Koordinasi dalam rangka pengendalian gangguan kawasan konservasi	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Pengurusan Administrasi Pemegang Senjata Api	Kantor Balai Besar
			Pengurusan Administrasi Senjata Api	Kantor Balai Besar
			Fasilitasi koordinasi/konsultasi satgas POLHUT lingkup TNGGP	Kantor Balai Besar
			Smart Patrol terkait Pengamanan Jalur Pendakian dan Wisata Alam	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Patroli Penanganan/ Supervisi Tindak Lanjut Informasi Terhadap Pelaporan Masyarakat/ Gangguan Kawasan	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Inhouse Training Smart Patrol dengan melibatkan Masyarakat Mitra Polhut lingkup TNGGP	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Smart Patrol terkait Pengecekan Jalur Pendakian Selabintana	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Smart Patrol bersama Masyarakat Mitra POLHUT	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Pengumpulan bahan dan keterangan intelijen	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Verlap, Pemutakhiran data perambahan di kawasan TNGGP	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Koordinasi/konsultasi terkait perlindungan Kawasan Konservasi	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Monev Kegiatan Pamhut, Tipihut dan Dalkarhut	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN

No.	Output	Komponen	Sub Komponen	Target Lokasi
			Monitoring dan evaluasi kinerja resort lingkup TNGGP	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Biaya Rapat/Pertemuan PTN Wilayah dengan instansi terkait/mitra/masyarakat	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Smart Patrol Jalur Batas Kawasan tingkat Resort	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Peningkatan Kapasitas SDM Polhut lingkup TNGGP	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Evakuasi Kecelakaan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian lingkup TNGGP	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Antisipasi pengamanan pengunjung wisata alam dan pendakian bersama instansi terkait lingkup TNGGP	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Smart Patrol Pencegahan Kebakaran Hutan/Illegal Logging/Kerusakan Kehati tingkat Bidang Wilayah	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Pemadaman kebakaran	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Rapat Koordinasi terkait pengamanan kawasan lingkup Internal BBTNGGP	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Manajemen gangguan kawasan melalui pengelolaan Sampah Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Optimalisasi koordinasi pengamanan gangguan kawasan melalui Penyelenggaraan Kegiatan SPIP	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
			Mitigasi penanganan konflik satwa liar di daerah penyangga	Kantor Balai Besar dan Bidang PTN
	5422.001 Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL [Base Line]	051 Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konsevasi	Monitoring Macan Tutul (Luas Site di Jublegan Cianjur = 2.720 Ha, Luas Non Site di Sukabumi dan Bogor = Ha)	Bidang PTN
			Monitoring Owa Jawa (Luas Site di Bogor 2.759 Ha, Luas Non Site di Cianjur dan	Bidang PTN

No.	Output	Komponen	Sub Komponen	Target Lokasi
			Sukabumi = Ha)	
			Monitoring Elang Jawa (Luas Site di Situgunung = 3.477 Ha, Luas Non Site di Cianjur dan Bogor = Ha)	Bidang PTN
			Operasional Javan Gibbon Center (JGC)	Bidang PTN
			FGD Identifikasi Potensi Bio-prospecting di kawasan BBTNGGP	Kantor Balai Besar
			Identifikasi dan inventarisasi kehati untuk penyusunan peta sebaran satwa liar tingkat resort	Kantor Balai Besar
			Pembuatan media informasi kehati (Leaflet, Banner, Video Pendek dll)	Kantor Balai Besar
			Identifikasi bioprospecting ke lapangan bersama masyarakat	Kantor Balai Besar
			Monitoring dan Pembinaan Habitat Edelweis di Alun-alun Suryakencana (Luas 50,3 Ha)	Kantor Balai Besar
			Monitoring populasi Rafflesia Roschunii di wilayah Resort Tapos dan Cimande (Luas Site 1,15 Ha)	Bidang PTN Wilayah III
			Penyusunan informasi kehati dalam bentuk e-buletin Edelweis	Kantor Balai Besar
	5423.001 Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan [Base Line]	052 Peningkatan Pengelolaan Jasa Wisata Alam berbasis masyarakat	Pembentukan forum wisata dalam rangka persiapan permohonan IUPJWA	Kantor Balai Besar
		054 Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam	Jambore dan Pameran Hari Konservasi Alam Nasional	Kantor Balai Besar
			Festival TN dan TWA	Kantor Balai Besar
			Peningkatan pelayanan pendakian di kantor balai besar	Kantor Balai Besar
			Festival Gede Pangrango 2020 bersama masyarakat dan instansi terkait	Kantor Balai Besar
			School Visit	Bidang PTN

No.	Output	Komponen	Sub Komponen	Target Lokasi
			Visit to shool	Bidang PTN
			Perpustakaan Konservasi Keliling pendukung kegiatan pendidikan lingkungan	Kantor Balai Besar
			Rehabilitasi wisma penelitian	Bidang PTN Wilayah I
			Pencetakan bahan informasi dan promosi wisata alam	Kantor Balai Besar
	5423.004 Jumlah Lokasi Pengembangan Sarpras Pengembangan DPP Model SBSN [Base Line]	051 Pembangunan Sarana Prasarana Ekowisata Model SBSN	Pembangunan Sanctuary Elang Jawa	Bidang PTN Wilayah II

### c. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Besar TNGGP pada tahun 2020, sebagaimana pagu indikatif tahun 2020, direncanakan sebesar Rp. 33.888.016.000,- (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam belas ribu rupiah). Alokasi pagu alokasi tersebut direncanakan untuk membiayai gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, belanja non operasional perkantoran serta kegiatan SBSN. Uraian rencana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Balai Besar TNGGP tahun 2020 adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran..

# BAB IV

# MONITORING DAN EVALUASI



---

## **BAB IV**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dapat dilakukan secara periodik baik oleh internal maupun oleh eksternal di tingkat Bidang, Seksi dan Resort Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Wilayah dengan cara:

- a. Monitoring secara langsung oleh Kepala Balai Besar TNGGP ke wilayah kerja baik ke Bidang PTN Wilayah, Seksi maupun Resort;
- b. Evaluasi dilakukan dengan melakukan rapat-rapat baik bulanan maupun rapat bersifat khusus per kegiatan/permasalahan;
- c. Dalam hal-hal tertentu dilakukan pemantauan secara mendadak oleh Kepala Balai Besar maupun Bidang PTN Wilayah untuk mengetahui kesiapan dan kehadiran serta pelaksanaan kegiatan rutin petugas TNGGP di Tingkat Bidang PTN Wilayah, Seksi dan Resort;

Monitoring dan evaluasi oleh para pihak dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi serta pelayanan prima TNGGP terhadap masyarakat yang membutuhkannya baik informasi maupun kepentingan lainnya sesuai dengan fungsi dan peran Balai Besar TNGGP sebagai kawasan konservasi. Pola yang dilakukan dalam pemantauan ini dilakukan secara langsung dengan melakukan audensi atau pertemuan-pertemuan maupun secara tidak langsung melalui wawancara/respondensi terhadap para pihak baik mitra kerja, instansi, maupun masyarakat sekitar kawasan TNGGP.

Monitoring dan evaluasi oleh instansi yang lebih tinggi dimana secara struktural dilakukan sesuai hirarki, dimana Balai Besar TNGGP merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan instansi pembina secara umum. Pembinaan secara teknis, dapat dilakukan oleh Direktorat Teknis terkait yang menangani hal-hal bersifat khusus terkait kendala yang dihadapi di tingkat tapak.

# BAB V PENUTUP



---

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2020 merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020 lingkup Balai Besar TNGGP. Selain digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2020, Renja ini juga selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Balai Besar TNGGP Tahun 2020. Tentu saja dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan kemungkinan akan adanya perubahan arah kebijakan pemerintah dari kabinet yang baru akan terbentuk serta adanya perubahan-perubahan prioritas dalam APBN Tahun 2020.

Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, kegiatan beserta seluruh indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaiannya, perlu mendapat perhatian secara serius agar mandat yang diberikan oleh negara dan masyarakat dapat dicapai secara optimal dengan penuh kesadaran akan tanggungjawab Balai Besar TNGGP kepada masyarakat Indonesia.

**LAMPIRAN**

**RENCANA KERJA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL**

**GUNUNG GEDE PANGRANGO**

**TAHUN 2020**

**RENCANA KERJA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TAHUN 2020**

**KEMENTERIAN** KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**PROGRAM** KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

**SASARAN PROGRAM** : 1. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI DAN UPAYA KONSERVASI KEHATI;  
2. PENINGKATAN PENERIMAAN DEVISA DAN PNBP DARI PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI KEHATI;

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Keluaran Output	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Pagu Anggaran
029.05.08-Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem									33.888.016.000
1	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam								220.550.000
Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam									
	002-Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi	Luas KK sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di Dalam Kawasan Konservasi		4935 Ha	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Penataan Kawasan Hutan	Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional)	27.250.000
	003-Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya		1 Dokumen	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Penataan Kawasan Hutan	Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional)	193.300.000
	004-Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di dalam Kawasan Konservasi	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya		0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	-
	007-Forest Programme III (Direktorat PIKA)			0%	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	-

<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Konservasi</b>	<b>5.789.076.000</b>
----------	---------------------------------------	----------------------

Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru

001-Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya	Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya	150 Ha	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya	Pemulihran dan konservasi daerah tangkapan air	3.887.716.000
002-Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di pesisir dan laut	2 Desa	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Penataan Kawasan Hutan	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional Berbasis Desa	251.360.000
003-Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	2 Unit KK	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya	Pemulihran dan konservasi daerah tangkapan air	1.650.000.000
004-Dokumen Pengelolaan Kawasan Konservasi		0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	-
010-Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	-
011-Forest Programme II Sumatera	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	-



3	<b>Konservasi Spesies dan Genetik</b>							804.750.000
<u>Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetic</u>								
001-Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	12 Ha	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem		804.750.000
002-Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan TSL yang telah memenuhi persyaratan ekspor	0	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Peningkatan industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir	Optimalisasi Hasil Hutan		0
003-Dokumen Perlindungan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		0

4	<b>Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi</b>	5.787.000.000						
<u>Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi</u>								
	001-Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan	Jumlah destinasi yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan	1 Destinasi	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 11 Destinasi Pariwisata Potensial	645.000.000
	002-Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam	Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam	0	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Penataan Kawasan Hutan	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional Berbasis Desa	0
	003-Dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	0

004-Jumlah Lokasi Pengembangan Sarpras Pengembangan DPP Model SBSN	Jumlah destinasi yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan	1 Unit	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 11 Destinasi Pariwisata Potensial	5.142.000.000
005-Forest Investment Program - Project 1 (FIP-1)	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	0

## 5 Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial

Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial

001-Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	0	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Air	Penataan Kawasan Hutan	Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa	0
002-Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	0	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Air	Penataan Kawasan Hutan	Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa	0

	003-Dokumen Pembinaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	0
6	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem</b>							<b>21.286.640.000</b>
		Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE						
	950-Layanan Dukungan Manjemen Eselon I	Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L	1 Layanan	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	874.640.000
	951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1 Layanan	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	776.000.000
	994-Layanan Perkantoran	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	19.636.000.000

**MATRIK STRUKTUR PENCAPAIAN IKK TAHUN 2020**  
**BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**

No	Program/ Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Sub Output	Komponen
	029.05.08-Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem					
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE (Setditjen KSDAE)					
	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L		1 Layanan	Satker TN	51 Penyusunan rencana program; dan 52 Penyusunan rencana anggaran 52 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 54 Pengelolaan keuangan 57 Pengelolaan kepegawaian 58 Pelayanan umum dan perlengkapan
	951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		1 Layanan	Satker TN	51 Pengadaan kendaraan bermotor 52 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 53 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 54 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan 55 Pengadaan tanah untuk pembangunan/renovasi gedung dan bangunan
	994-Layanan Perkantoran	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan		1 Layanan	Satker TN	1 Gaji dan Tunjangan 2 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
2	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam					
	002- Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi	Luas KK sebagai penyediaan Data, Informasi dan		4.935 Ha	Satker TN	51 Plot Sample Permanen 52 Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi (Kehati)

Nasional didalam Kawasan Konservasi	Rencana Konservasi Nasional di Dalam Kawasan Konservasi			53	Jumlah rekomendasi pemantauan (monitoring) dan pemantapan fungsi KK
003-Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	<b>1 Dokumen</b>	Satker TN	51 52 53	Penataan Zonasi/Blok Kawasan Konservasi Penandaan tanda Zona/Blok di Kawasan konservasi Kerjasama di Kawasan Konservasi
004-Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di dalam Kawasan Konservasi	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	<b>0</b>	Data dan Informasi Potensi di dalam Kawasan Konservasi	51 52 53 54	Prakondisi Plot Sample Permanen Data Spasial Potensi Kawasan Konservasi Rekomendasi pemantauan (monitoring) dan pemantapan fungsi KK Penyusunan Rencana Konservasi Nasional
007-Forest Programme III (Direktorat PIKA)		<b>0</b>	Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi	51 52 53 54	Fasilitasi Penataan Zonasi/Blok Kawasan Konservasi Fasilitasi Penandaan tanda Zona/Blok di Kawasan konservasi Fasilitasi Penyelesian Dokumen Pemantapan KK dan terbentuk sebagai dasar pengelola KK (NSPK) Fasilitasi Kerjasama di Kawasan Konservasi
		<b>Project management FP III</b>		51 52 53 54	Pengelolaan Keuangan dan Proyek Pelayanan konsultan (implementasi dan penelitian) Peningkatan Kapasitas Penandaan batas hidup Patroli Kawasan dan Pemantauan Kehati



	Dokumen Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	52	laporan pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat di sekitar KK
	Dokumen Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	51 52 53	pengesahan RP dan RPJP laporan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi laporan pengendalian kebakaran hutan
010-Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	0	Tanpa sub output  51 <i>Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem</i> 52 Dana Pendamping BCCCP-GLE (RMP)
011-Forest Programme II Sumatera	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	0	Tanpa sub output  51 Pengurangan tekanan terhadap SDA di BKSDA Jambi dan Peningkatan Kapasitas 52 Keanekaragaman dan Pengelolaan Habitat 53 Masterplan Ekowisata yang bekerjasama dengan PEMDA 54 Program Pelatihan Bersama PEMDA Pembangunan Mekanisme Koordinasi 55 dengan Stakeholder

**4 Konservasi Spesies dan Genetik**

001-Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	12 Ha	Satker Taman Nasional	51 Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konsevasi 52 Intervensi Manajemen TSL di luar Kawasan Konsevasi 53 Penanganan Satwa Transit dan Konflik 54 Pengelolaan Zoonosis dan IAS
002-Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan TSL yang telah memenuhi persyaratan ekspor	0	Satker Taman Nasional	51 Intervensi Manajemen TSL Peredaran dan Penangkaran 52 Pengembangan Jenis Bioprospecting
003-Dokumen Perlindungan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	0	Dokumen Perlindungan Kehati	51 Penyusunan NSPK 52 Data dan Informasi Perlindungan Kehati 53 Bimtek/Supervisi/Monev 54 Penanganan Satwa Transit dan Konflik
				51 Penyusunan NSPK 52 Data dan Informasi Pemanfaatan Kehati 53 Bimtek/Supervisi/Monev 54 Kerjasama Internasional dan Kemitraan 55 Rekomendasi kajian keamanan lingkungan terhadap Produk Rekayasa Genetik (PRG) 56 Rekomendasi Pemanfaatan Bioprospecting 57 Penilaian Kelayakan Penangkaran 58 Penilaian Kelayakan Lembaga Konservasi 59 Evaluasi Kelayakan Izin Edar Luar Negeri

					Mekanisme kompensasi Pemanfaatan Kehati untuk mendukung pengelolaan konservasi
5	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi				
001-Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan	Jumlah destinasi yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan	1 Destinasi	Satker Taman Nasional	51 52 53 54	Penataan Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Peningkatan Pengelolaan Jasa Wisata Alam berbasis masyarakat Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam
002-Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam	Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam	0	Satker Taman Nasional	51 52 53	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/Energi Air Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon
003-Dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	0	Dokumen Wisata Alam	51 52 53 54 55	Penyusunan NSPK Pengesahan Dokumen Design Tapak/ FS dan DED/ Masterplan/ Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam Audit, evaluasi dan rekomendasi tindaklanjut kinerja IPPA Fasilitasi penyiapan Destinasi Wisata Alam Prioritas Verifikasi pelayanan perizinan wisata alam
			Dokumen Non Wisata Alam	51 52 53	Penyusunan NSPK Pengesahan Penetapan Area Pemanfaatan Air dan Energi Air/RPPA Percepatan perizinan pemanfaatan Panas Bumi



	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	Dokumen Penyediaan Data dan Informasi Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	52 Verifikasi identifikasi dan inventarisasi potensi kehati
003-Dokumen Pembinaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial		53 Registrasi Ekosistem Esensial	
		Dokumen Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	Fasilitasi Pemantapan Pengelolaan Ekosistem Esensial Lahan Basah dan Taman Kehati
		51	Fasilitasi Pemantapan Pengelolaan Ekosistem Esensial Koridor Satwa dan ABKT
		52	Supervisi Peningkatan Usaha Ekonomi
		53	Produktif Masyarakat Desa di sekitar Kawasan Ekosistem Esensial





Taman Nasional  
**Gunung GEDEPANGRANGO**